



DAMPAK PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA DI KABUPATEN TANGERANG

Ivanka Tri Agustin¹, Siti Nurbaiti², Akrom³

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ^{1,2,3}

Email: ivankaatriagustin@gmail.com¹, sitinurbaitinote12@gmail.com²

ABSTRACT

Rapid population growth in Tangerang Regency has created serious pressure on job availability. This study aims to analyze the impact of population growth on the labor market and formulate mitigation strategies. The method used is library research with content analysis of BPS data, relevant agency reports, and academic journals from the 2015–2025 period. Seven main findings of this study are: (1) population growth rate reaches 2.3% per year, dominated by migration; (2) the proportion of working-age population reaches 68%; (3) labor force growth (3.1%) far exceeds formal job growth (1.2%); (4) the informal sector covers 58% of workers with wages below the district minimum wage; (5) competency mismatch occurs with 25% of industrial vacancies unfilled; (6) the vocational training budget is only 0.7% of the regional budget; (7) employment absorption elasticity per investment has declined drastically. The study concludes that population growth without being balanced by formal job expansion and vocational education transformation will worsen hidden unemployment and structural poverty. Integrated strategies are needed, including population control, restructuring of vocational training centers, and labor-intensive investment incentives.

Keywords : *population growth, job availability, Tangerang Regency, competency mismatch, informal sector*

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang cepat di Kabupaten Tangerang telah menimbulkan tekanan serius terhadap ketersediaan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pertumbuhan penduduk terhadap pasar kerja serta merumuskan strategi penanganannya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis isi terhadap data BPS, laporan dinas terkait, dan jurnal akademik periode 2015–2025. Tujuh temuan utama penelitian ini adalah: (1) laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% per tahun didominasi migrasi; (2) proporsi usia produktif mencapai 68%; (3) pertumbuhan angkatan kerja (3,1%)

jauh melampaui pertumbuhan lapangan kerja formal (1,2%); (4) sektor informal mencakup 58% pekerja dengan upah di bawah UMK; (5) terjadi mismatch kompetensi dengan 25% lowongan industri tidak terisi; (6) anggaran pelatihan kerja hanya 0,7% APBD; (7) elastisitas penyerapan tenaga kerja per investasi menurun drastis. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tanpa diimbangi perluasan lapangan kerja formal dan transformasi pendidikan vokasional akan memperparah pengangguran terselubung dan kemiskinan struktural. Diperlukan strategi pengendalian penduduk, restrukturisasi BLK, serta insentif investasi padat karya.

Kata Kunci : *pertumbuhan penduduk, ketersediaan lapangan kerja, Kabupaten Tangerang, mismatch kompetensi, sektor informal*

PENDAHULUAN

Fenomena pertumbuhan penduduk merupakan isu demografis sentral yang senantiasa beririsan dengan berbagai aspek pembangunan, terutama di wilayah-wilayah penyangga metropolitan seperti Kabupaten Tangerang. Sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Jabodetabek, Kabupaten Tangerang mengalami transformasi sosial-ekonomi yang cepat, didorong oleh urbanisasi, kelahiran, serta mobilitas penduduk dari Jakarta dan sekitarnya yang mencari hunian lebih terjangkau. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang rata-rata melebihi 2% per tahun dalam dua dekade terakhir, telah mengubah struktur kependudukan menjadi didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun). Kondisi ini, secara teoritis, menghadirkan bonus demografi, namun di sisi lain memunculkan tekanan luar biasa terhadap penyediaan lapangan kerja yang memadai dan berkualitas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hubungan kausal antara dinamika kependudukan dan ketimpangan serapan tenaga kerja menjadi sangat krusial bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan berkelanjutan. (BPS Kota Tangerang, 2025)

Kabupaten Tangerang, dengan luas wilayah sekitar 1.011,86 km², menghadapi tantangan struktural dalam menyeimbangkan antara pasokan tenaga kerja yang terus membengkak dan permintaan tenaga kerja dari sektor-sektor ekonomi unggulan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa setiap tahun, rata-rata lebih dari 50.000 penduduk memasuki usia kerja, namun pertumbuhan lapangan kerja baru, terutama di sektor formal dan manufaktur, cenderung stagnan atau bahkan berkurang akibat otomatisasi industri. Sektor pertanian tradisional yang dahulu menjadi penyerap utama tenaga kerja kini menyusut karena alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman, industri, dan jasa. (Dinsos Kota Tangerang, 2025) Akibatnya, terjadi pergeseran struktural yang cepat menuju sektor jasa dan informal, namun tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas keterampilan angkatan kerja. Hal ini menciptakan jurang kesenjangan antara kualifikasi yang

dibutuhkan pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja lokal, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang kerap berada di atas rata-rata provinsi.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga memperparah persaingan antarpencari kerja, terutama di kalangan pemuda lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi yang belum memiliki pengalaman profesional. Kabupaten Tangerang, yang menjadi tujuan migrasi masuk berskala besar, menyaksikan bagaimana warga pendatang sering kali lebih siap secara kompetensi atau bersedia menerima upah lebih rendah dibandingkan penduduk asli, sehingga memicu friksi sosial dan ketidakstabilan pasar kerja lokal. Di sisi lain, ekspansi kawasan industri seperti di Balaraja, Cikupa, dan Pasarkemis justru lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan spesialisasi teknik dan vokasional, sementara mayoritas angkatan kerja lokal berpendidikan umum. Kondisi ini mengindikasikan adanya *mismatch* struktural antara arah kebijakan pembangunan industri dengan pola penyiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah. Akibatnya, tingkat setengah pengangguran dan pekerja dengan jam kerja paruh waktu melonjak, yang mencerminkan rendahnya kualitas penyerapan tenaga kerja meskipun secara kuantitas angka pengangguran tampak terkendali.

Dimensi spasial dan infrastruktur juga turut memperumit hubungan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Tangerang. Pembangunan perumahan massal dan kawasan mixed-use di sepanjang koridor tol Tangerang-Merak telah mengubah pola permukiman dan mobilitas tenaga kerja. Sayangnya, pertumbuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas antarkawasan industri belum sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga banyak angkatan kerja yang harus bekerja di luar kabupaten terutama di Jakarta dan Tangerang Selatan namun tetap tinggal di Kabupaten Tangerang. Fenomena ini menciptakan ilusi bahwa lapangan kerja lokal mencukupi, padahal sebenarnya terjadi “kebocoran” tenaga kerja dan pendapatan ke wilayah lain. Lebih buruk lagi, ketergantungan pada wilayah eksternal untuk penyerapan kerja membuat Kabupaten Tangerang rentan terhadap gejolak ekonomi makro, seperti resesi atau kebijakan relokasi industri ke luar pulau Jawa. Dengan demikian, daya dukung wilayah terhadap perluasan lapangan kerja berbasis potensi lokal menjadi terabaikan, dan ketimpangan regional antar kecamatan di Kabupaten Tangerang pun semakin melebar. (Pemkot Tangerang, 2025)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dampak pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Tangerang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Fokus utama kajian ini adalah mengukur elastisitas pertumbuhan angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja formal dan informal, mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang paling terdampak, serta

mengevaluasi efektivitas program pelatihan kerja dan investasi yang telah dijalankan pemerintah daerah. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa pertumbuhan penduduk yang didominasi migrasi dan tingginya angka kelahiran di kelompok usia produktif secara signifikan menurunkan kualitas ketersediaan lapangan kerja, meskipun tidak selalu meningkatkan angka pengangguran terbuka secara dramatis. Dengan menggunakan data panel dari BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang periode 2015–2025, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi studi ekonomi kependudukan sekaligus rekomendasi kebijakan yang operasional dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan desain kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis hubungan kausal antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Tangerang berdasarkan sumber-sumber dokumentasi sekunder. Sumber data utama yang dianalisis meliputi publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang, seperti Kabupaten Tangerang dalam Angka (2015–2025), data proyeksi penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta data penyerapan tenaga kerja menurut sektor ekonomi. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan laporan tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kajian akademik dari jurnal terindeks, prosiding seminar, dan skripsi/tesis yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran digital pada basis data seperti Google Scholar, Scopus, dan portal garuda.ristekbrin.go.id, dengan kata kunci terstruktur: "pertumbuhan penduduk AND lapangan kerja", "tenaga kerja Kabupaten Tangerang", "urbanisasi dan pengangguran struktural", serta "bonus demografi Tangerang". Dokumen yang terkumpul diseleksi berdasarkan kriteria inklusi: terbit dalam 10 tahun terakhir (2015–2025), memiliki relevansi tematik langsung dengan Kabupaten Tangerang, serta menyajikan data empiris yang terukur. Sumber yang bersifat opini publik atau tidak memiliki rujukan data primer dikecualikan. (Effendy & Sudarso, 2021)

Analisis data dalam studi pustaka ini dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan sintesis tematik. Setelah seluruh dokumen terkumpul dan diklasifikasikan menurut variabel penelitian yaitu (1) laju pertumbuhan penduduk, (2) komposisi usia produktif, (3) tingkat partisipasi angkatan kerja, dan (4) ketersediaan lapangan kerja formal-informal peneliti melakukan pembacaan kritis secara berulang (*iterative reading*) untuk mengidentifikasi pola, konsistensi data, serta kontradiksi antar sumber. Untuk menguji keandalan temuan, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data BPS, laporan dinas, dan hasil penelitian terdahulu; jika ditemukan perbedaan angka (misalnya proyeksi

penduduk yang tidak sinkron), maka digunakan data dengan tingkat otoritas kelembagaan tertinggi (BPS) sebagai rujukan utama. Sintesis tematik dilakukan dengan memetakan hubungan antar variabel ke dalam kerangka teori ketenagakerjaan klasik (model Todaro tentang migrasi dan pengangguran perkotaan) serta teori transisi demografi. Hasil sintesis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian: bagaimana dinamika pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang, bagaimana dampaknya terhadap serapan tenaga kerja per sektor, dan faktor apa yang paling dominan dalam memperburuk ketimpangan lapangan kerja. Proses analisis ini juga dilengkapi dengan penyajian data tabular sederhana (misalnya tren TPT per tahun) yang diekstrak dari sumber pustaka, guna memperkuat argumen kuantitatif meskipun penelitian ini tidak melakukan perhitungan statistik independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Laju Pertumbuhan Penduduk dan Komposisi Usia Produktif di Kabupaten Tangerang

Data BPS Kabupaten Tangerang tahun 2015–2025 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk rata-rata mencapai 2,3% per tahun, angka yang secara konsisten melampaui rata-rata nasional (1,1%) maupun provinsi Banten (1,8%). Lonjakan ini tidak hanya disebabkan oleh angka kelahiran total (TFR) yang masih berada di kisaran 2,1, tetapi lebih didominasi oleh migrasi masuk berskala besar dari Jakarta dan wilayah sekitarnya yang mencari hunian suburban dengan harga lebih terjangkau. Akibatnya, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 diperkirakan telah menembus 3,8 juta jiwa, dengan proporsi usia produktif (15–64 tahun) mencapai 68% dari total populasi. Bonus demografi ini secara teoritis seharusnya menjadi modal pembangunan ekonomi, namun dalam praktiknya justru menciptakan beban karena lapangan kerja yang tersedia tidak tumbuh sebanding dengan penambahan angkatan kerja yang mencapai 45.000–55.000 orang setiap tahunnya. Temuan ini sejalan dengan studi Todaro (1969) bahwa migrasi ke wilayah peri-urban justru memperbesar angka pengangguran friksional jika sektor formal tidak mampu mengakomodasi kecepatan masuknya tenaga kerja baru.

Konsentrasi penduduk usia produktif tidak tersebar merata di seluruh kecamatan, melainkan terpusat di koridor timur dan selatan Kabupaten Tangerang, yakni di Kecamatan Ciputat, Pamulang, dan BSD (bagian dari wilayah ekspansi kota satelit). Sementara itu, kawasan industri utama di Balaraja, Cikupa, dan Pasarkemis justru memiliki proporsi usia produktif yang lebih rendah karena terbatasnya ketersediaan lahan pemukiman bagi pekerja pabrik. Ketimpangan spasial ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara pusat pasokan tenaga kerja dengan pusat permintaan tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan biaya transportasi dan waktu tempuh harian para pencari kerja. Data dari Dinas Perhubungan Kabupaten

Tangerang mencatat bahwa rata-rata pekerja di sektor industri menghabiskan 2,5 hingga 3 jam per hari untuk perjalanan pulang-pergi, suatu kondisi yang secara tidak langsung menurunkan produktivitas dan memperbesar kemungkinan terjadinya perputaran kerja (turnover) yang tinggi. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkelola dengan baik justru menciptakan inefisiensi struktural dalam pasar kerja lokal.

Kesenjangan antara Pasokan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Lapangan Kerja Formal

Salah satu temuan paling mencolok dari kajian pustaka ini adalah adanya *mismatch* kuantitatif antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja formal di Kabupaten Tangerang. Selama periode 2015–2025, rata-rata pertumbuhan angkatan kerja mencapai 3,1% per tahun, sementara pertumbuhan lapangan kerja formal (sektor industri manufaktur, perbankan, asuransi, dan jasa korporasi) hanya tumbuh sekitar 1,2% per tahun. Akibatnya, rasio pencari kerja formal terhadap lowongan kerja yang tersedia meningkat dari 1:4 menjadi 1:7 dalam kurun waktu satu dekade. Sektor manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Tangerang seperti industri kimia, tekstil, dan komponen otomotif justru mengalami kontraksi tenaga kerja akibat adopsi otomatisasi dan robotika. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan bahwa pabrik-pabrik besar di kawasan Pasar Kemis dan Balaraja telah mengurangi hingga 15% tenaga kerja operator mesin dalam lima tahun terakhir, sementara permintaan terhadap teknisi pemeliharaan otomasi meningkat namun tidak dapat dipenuhi karena minimnya pelatihan vokasional lokal.

Kondisi ini diperparah oleh kebijakan investasi yang lebih mengutamakan padat modal dibandingkan padat karya. Meskipun nilai investasi asing dan domestik di Kabupaten Tangerang meningkat rata-rata 8% per tahun, penyerapan tenaga kerja per satu miliar rupiah investasi justru menurun dari 25 orang (tahun 2015) menjadi hanya 12 orang (tahun 2025). Sektor jasa modern seperti ritel berskala besar, pusat perbelanjaan, dan e-commerce fulfillment center memang menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, tetapi sebagian besar bersifat paruh waktu, kontrak jangka pendek, dan tanpa jaminan sosial yang memadai. Akibatnya, angkatan kerja yang tidak terserap ke sektor formal terpaksa berkompetisi di pasar kerja informal yang sudah kelebihan muatan. Studi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang menyimpulkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang radikal, kesenjangan ini akan terus melebar setidaknya hingga tahun 2030, menciptakan kantong-kantong pengangguran terselubung di permukiman padat penduduk seperti di Kecamatan Teluknaga dan Sepatan.

Dominasi Sektor Informal dan Degradasi Kualitas Pekerjaan

Ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap laju pertumbuhan angkatan

kerja telah menyebabkan sektor informal menjadi katup pengaman sekaligus tempat pembuangan akhir tenaga kerja di Kabupaten Tangerang. Data Sakernas BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa proporsi pekerja informal (pekerja lepas, usaha mikro tanpa badan hukum, buruh harian tidak tetap, dan pekerja keluarga tanpa upah) mencapai 58% dari total angkatan kerja yang bekerja, meningkat tajam dari 44% pada tahun 2015. Kawasan permukiman padat di sepanjang aliran sungai Cisadane dan Kali Angke menjadi episentrum tumbuhnya ekonomi informal seperti pedagang kaki lima, pengumpul barang bekas, jasa ojek daring, dan bengkel kecil-kecilan. Meskipun secara statistik angka pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang hanya sekitar 6,5% (masih di bawah rata-rata nasional 7,2%), angka ini sangat menyesatkan karena mengabaikan fakta bahwa 34% dari pekerja informal bekerja di bawah 35 jam per minggu dengan penghasilan di bawah upah minimum kabupaten (UMK) yang ditetapkan sekitar Rp 4,5 juta per bulan.

Dominasi sektor informal tidak hanya berdampak pada rendahnya pendapatan, tetapi juga pada tidak adanya perlindungan ketenagakerjaan, akses terhadap jaminan kesehatan, serta kepastian pensiun. Studi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang ketahanan sosial di wilayah peri-urban menemukan bahwa pekerja informal di Kabupaten Tangerang memiliki kerentanan ekonomi yang sangat tinggi; sekitar 40% dari mereka tidak memiliki tabungan untuk bertahan lebih dari satu minggu jika mengalami sakit atau kehilangan sumber penghasilan. Kondisi ini diperburuk oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, yang menyebabkan persaingan di sektor informal semakin ketat dan mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi berupah rendah (*low-wage equilibrium*). Para pendatang baru yang tidak memiliki jaringan sosial atau keterampilan khusus terpaksa menerima upah di bawah standar, bahkan ada yang bekerja dengan sistem "barter" atau hanya diberi makan sebagai imbalan.

Mismatch Kompetensi antara Lulusan Pendidikan dengan Kebutuhan Industri

Salah satu faktor struktural yang memperparah dampak pertumbuhan penduduk terhadap lapangan kerja adalah ketidakselarasan antara kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan riil dunia industri di Kabupaten Tangerang. Data dari Dinas Tenaga Kerja menunjukkan bahwa dari total 80.000 pengangguran terbuka pada tahun 2025, lebih dari 60% adalah lulusan SMA/SMK dan diploma. Ironisnya, kawasan industri di Kabupaten Tangerang justru mengalami kekurangan tenaga kerja terampil di bidang mekatronika, pengelasan bersertifikasi, operator CNC (Computer Numerical Control), dan teknisi logistik berbasis sistem informasi. Sebanyak 32 perusahaan manufaktur besar yang disurvei oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) setempat melaporkan bahwa 25% lowongan kerja tidak dapat diisi karena tidak ada pelamar dengan kualifikasi yang sesuai, sementara di sisi lain ribuan pemuda lulusan SMK menganggur karena keahlian yang diajarkan di sekolah seperti tata boga, tata busana, dan multimedia

tidak relevan dengan spesialisasi industri yang berbasis otomasi dan digitalisasi. Fenomena *skill gap* ini secara langsung diperburuk oleh pertumbuhan penduduk usia produktif yang cepat, karena semakin banyak lulusan baru yang bersaing untuk jenis pekerjaan yang sama, namun tanpa kompetensi yang diminta.

Sistem pendidikan vokasional yang ada di Kabupaten Tangerang, seperti beberapa SMK negeri dan swasta serta politeknik, masih beroperasi dengan peralatan praktik yang usang dan kurikulum yang lambat beradaptasi dengan perkembangan teknologi industri. Sementara itu, pusat pelatihan kerja milik pemerintah (BLK) hanya mampu melatih sekitar 3.000 orang per tahun, sebuah angka yang sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan pelatihan ulang (*reskilling*) bagi lebih dari 200.000 pekerja yang terancam terdampak otomatisasi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi memperlebar jurang ini karena jumlah lulusan baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahun jauh melebihi kapasitas program pelatihan ulang. Akibatnya, banyak angkatan kerja muda yang akhirnya bekerja di sektor jasa informal dengan upah rendah, atau menjadi pengangguran jangka panjang yang kehilangan motivasi mencari kerja (dikenal sebagai *discouraged workers*). Studi komparatif dengan Kabupaten Bekasi dan Karawang menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang tertinggal dalam hal kemitraan antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan vokasional, sehingga siklus *mismatch* kompetensi terus berulang tanpa solusi sistemik. (Disnaker Kota Tangerang, 2025)

Kebijakan Pengendalian Penduduk, Investasi, dan Pelatihan Kerja: Evaluasi Kritis

Menghadapi tekanan dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah merumuskan sejumlah kebijakan, namun efektivitasnya masih dipertanyakan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka ini. Kebijakan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) dan sosialisasi pembatasan kelahiran di wilayah padat belum menunjukkan dampak signifikan karena faktor budaya dan tingginya arus migrasi yang sulit dikendalikan. Pembatasan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk perumahan baru di kecamatan-kecamatan tertentu justru menyebabkan migran berpindah ke kecamatan lain yang belum diatur, seperti Kecamatan Sukadiri dan Gunung Kaler, sehingga hanya memindahkan masalah tanpa menyelesaikannya. Di sisi investasi, Pemkab Tangerang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memang berhasil menarik investasi bernilai triliunan rupiah, namun insentif yang diberikan lebih menguntungkan industri padat modal. Belum ada kebijakan *local content requirement* (kewajiban mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan proporsi tertentu) yang ditegakkan secara konsisten, sehingga banyak perusahaan asing lebih memilih mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah atau menggunakan tenaga kerja harian lepas untuk menghindari kewajiban jaminan sosial dan upah minimum.

Evaluasi lebih lanjut terhadap program pelatihan kerja menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan untuk Balai Latihan Kerja (BLK) hanya 0,7% dari total APBD Kabupaten Tangerang tahun 2025, suatu angka yang sangat kecil mengingat skala masalah yang dihadapi. Selain itu, kurikulum pelatihan yang ditawarkan masih didominasi oleh keterampilan tradisional seperti menjahit, merakit elektronik sederhana, dan tata rias, sementara kebutuhan industri akan keahlian digital seperti pemrograman PLC (Programmable Logic Controller), pengoperasian drone untuk inspeksi pabrik, serta manajemen rantai pasok berbasis cloud sama sekali tidak tersedia. Rekomendasi dari kajian ini menekankan perlunya kebijakan terintegrasi yang mencakup: (1) moratorium sementara pembangunan perumahan massal di kecamatan dengan tingkat pengangguran tinggi, (2) pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang menyelenggarakan program magang dan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 20% tenaga kerja lokal, (3) revitalisasi total BLK dengan dukungan dana alokasi khusus dari pusat, serta (4) pembentukan pusat data pasar kerja real-time yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung berbasis kecamatan.

Strategi Penanganan Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Ketersediaan Lapangan Kerja di Kabupaten Tangerang

1. Strategi Pengendalian dan Redistribusi Penduduk Berbasis Tata Ruang

Strategi pertama berfokus pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui kebijakan tata ruang yang ketat dan redistribusi penduduk secara terencana. Berdasarkan temuan bahwa migrasi masuk tidak terkendali ke Kecamatan Ciputat, Pamulang, dan BSD menjadi penyebab utama ketimpangan spasial pasokan tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu memberlakukan kebijakan zonasi tempat tinggal bagi pendatang baru dengan sistem kuota tahunan yang disesuaikan terhadap daya dukung wilayah dan ketersediaan lapangan kerja di masing-masing kecamatan. Selain itu, pemerintah harus mengaktifkan kembali program transmigrasi lokal dengan memindahkan sebagian penduduk usia produktif dari kecamatan padat ke kecamatan yang masih kekurangan tenaga kerja seperti Gunung Kaler, Sukadiri, dan Mauk yang memiliki potensi pertanian dan perikanan darat namun belum tergarap optimal. Kebijakan ini harus didukung dengan penyediaan perumahan sederhana bersubsidi, akses transportasi publik yang memadai, serta insentif upah tambahan bagi pekerja yang bersedia direlokasi. Dalam jangka panjang, Pemkab perlu melakukan moratorium sementara penerbitan IMB untuk perumahan dan kawasan hunian vertikal di wilayah timur dan selatan, serta mengalihkan izin investasi properti ke wilayah barat dan utara yang selama ini termarjinalkan dari pembangunan. Redistribusi penduduk secara aktif, jika dikombinasikan dengan penguatan program Keluarga Berencana yang disertai pendekatan budaya dan agama melalui tokoh masyarakat, dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,3% menjadi 1,5% dalam kurun waktu lima tahun,

sehingga tekanan terhadap pasar kerja lokal dapat berkurang secara signifikan.

2. Strategi Transformasi Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri

Strategi kedua bersifat struktural jangka menengah dengan target utama menghilangkan *skill gap* yang menyebabkan ketidakserasian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan temuan bahwa 25% lowongan kerja industri tidak terisi karena kekurangan tenaga kerja terampil di bidang mekatronika, otomasi, CNC, dan logistik digital, maka pemerintah daerah harus memaksakan kurikulum berbasis *teaching factory* di seluruh SMK negeri dan swasta dengan cara mewajibkan kemitraan formal antara sekolah dan minimal tiga perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Balaraja, Cikupa, dan Pasarkemis. (Kemenko PMK, 2025) Implementasinya memerlukan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional yang mewajibkan alokasi 30% dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan manufaktur besar untuk pengadaan peralatan praktik modern dan pelatihan instruktur.

Di sisi lain, Balai Latihan Kerja (BLK) harus segera direstrukturisasi dengan meningkatkan anggarannya dari 0,7% menjadi 5% dari APBD, serta mengubah total kurikulum pelatihan dari keterampilan tradisional menjadi keahlian digital dan teknik tinggi seperti pemrograman PLC, pengoperasian drone inspeksi, perbaikan robot industri, dan manajemen rantai pasok berbasis *cloud* dengan target 10.000 peserta terlatih per tahun. Pemerintah juga perlu membangun satu Pusat Pengembangan Karir dan Pemetaan Kompetensi (P2KP) yang terhubung secara *real-time* dengan sistem perekrutan perusahaan di Kabupaten Tangerang, sehingga setiap pencari kerja dapat memetakan kekurangan keterampilannya secara individual dan langsung direkomendasikan ke program pelatihan yang tepat. Strategi ini diproyeksikan dapat menurunkan *mismatch* kompetensi hingga 40% dalam tiga tahun, sekaligus meningkatkan proporsi penyerapan tenaga kerja lokal di sektor formal dari 42% menjadi 60%. (Bappeda Kabupaten Tangerang, 2025)

3. Strategi Perluasan Lapangan Kerja Formal melalui Insentif Investasi Padat Karya

Strategi ketiga bersifat langsung dengan target ekspansi kuantitas lapangan kerja formal melalui kebijakan insentif investasi yang selektif dan promosi sektor ekonomi baru yang belum tergarap. Berdasarkan temuan bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja per satu miliar rupiah investasi menurun drastis dari 25 menjadi 12 orang akibat dominasi industri padat modal, pemerintah Kabupaten Tangerang harus memberlakukan sistem insentif pajak progresif terbalik, yaitu perusahaan dengan rasio tenaga kerja per unit modal yang lebih tinggi (padat karya) mendapat potongan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 30%, sementara perusahaan padat modal dengan serapan tenaga kerja rendah dikenakan pajak tambahan yang dialokasikan untuk dana pelatihan kerja. Selain itu, pemkab perlu

secara aktif membuka kawasan industri baru yang difokuskan pada sektor ekonomi hijau dan ekonomi perawatan (*care economy*) yang belum dikembangkan, misalnya industri daur ulang sampah plastik dan organik di TPA Rawa Kucing, industri panel surya untuk permukiman padat penduduk, serta pengembangan pabrik pengolahan hasil perikanan di kecamatan pesisir Kronjo dan Mauk.

Sektor pariwisata bahari dan agrowisata juga dapat menjadi lokomotif lapangan kerja baru dengan membangun Taman Wisata Alam Situ Cipondoh dan pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Tanjung Pasir yang melibatkan tenaga kerja lokal sebagai pemandu, pengelola homestay, dan perajin suvenir. Pemerintah juga harus menginisiasi program *One Village One Industry* yang memberikan bantuan peralatan produksi dan akses permodalan lunak bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di setiap desa, dengan syarat wajib mempekerjakan minimal 10 warga desa setempat. Jika strategi ini dijalankan konsisten, target penciptaan 50.000 lapangan kerja formal baru per tahun dapat dicapai, sehingga kelebihan pasokan tenaga kerja akibat pertumbuhan penduduk dapat terserap tanpa harus terbuang ke sektor informal yang berupah rendah dan tanpa perlindungan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kabupaten Tangerang yang rata-rata mencapai 2,3% per tahun serta didominasi oleh migrasi masuk dan tingginya proporsi usia produktif (68%) telah menimbulkan tekanan signifikan terhadap ketersediaan lapangan kerja. Tekanan ini bermanifestasi dalam tiga bentuk utama: pertama, kesenjangan kuantitatif antara pertumbuhan angkatan kerja (3,1% per tahun) dengan pertumbuhan lapangan kerja formal yang hanya 1,2% per tahun; kedua, membengkaknya sektor informal hingga mencakup 58% angkatan kerja yang bekerja, disertai degradasi kualitas pekerjaan (upah rendah, jam kerja tidak pasti, tanpa perlindungan sosial); ketiga, terjadinya mismatch kompetensi struktural di mana 25% lowongan industri tidak terisi akibat ketidaksesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan otomasi dan digitalisasi industri. Dengan kata lain, bonus demografi yang semestinya menjadi peluang justru berubah menjadi beban karena ketiadaan kebijakan adaptif dalam penciptaan lapangan kerja formal yang padat karya dan berbasis kompetensi lokal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi terintegrasi yang meliputi tiga jenis kebijakan secara simultan: (1) pengendalian dan redistribusi penduduk berbasis tata ruang melalui moratorium perumahan massal di wilayah padat serta transmigrasi lokal ke kecamatan pinggiran; (2) transformasi pendidikan vokasional dan pelatihan kerja berbasis *teaching factory* serta peningkatan anggaran BLK dari 0,7% menjadi 5% APBD; (3) perluasan lapangan kerja formal melalui

insentif pajak bagi industri padat karya, pengembangan sektor ekonomi hijau dan pariwisata bahari, serta program One Village One Industry. Tanpa implementasi ketiga strategi ini secara konsisten dan berkelanjutan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan terus memperlebar ketimpangan antara pasokan dan permintaan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang, yang pada akhirnya berpotensi memicu ledakan pengangguran terselubung, kemiskinan struktural, dan ketidakstabilan sosial-ekonomi di kawasan penyangga metropolitan Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). *Multidimensional poverty measurement and analysis*. Oxford Poverty & Human Development Initiative.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2025–2029*. Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang. (2024). *Kabupaten Tangerang dalam angka 2025*. <https://tangerangkab.bps.go.id/id/publication>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang. (2025). *Data kemiskinan Kota Tangerang tahun 2020–2025*. BPS Kota Tangerang.
- Budiyanto, A., & Effendy, A. A. (2020). Analisa kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap pemberdayaan koperasi dan UMKM dan dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, 4(1), 80–93.
- Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang. (2025). *Data ketenagakerjaan dan pelatihan kerja*. Pemerintah Kota Tangerang.
- Dinas Sosial Kota Tangerang. (2025). *Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan intervensi sosial*. Pemerintah Kota Tangerang.
- Djamarah, S. B., & Zain, A. (2014). *Strategi belajar mengajar (Edisi ke-5)*. PT Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. (1999). *Public policy analysis: An introduction (3rd ed.)*. Prentice Hall.
- Effendy, A. A., Budiyanto, A., Nurhadi, A., Murtiyoko, H., & Mas'adi, M. (2020). Implementasi kewirausahaan dan koperasi di sekolah pada SMK Mulia Buana, Parung Panjang–Kab. Bogor. *DEDIKASI PKM*, 1(2), 105–110.
- Effendy, A. A., Mas'adi, M., Nurhadi, A., Murtiyoko, H., & Sudarso, A. P. (2021). Meningkatkan daya jual produk melalui pemasaran online di masa pandemi pada wirausaha pelajar Indonesia Kota Bogor. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 4(1), 83–88.
- Effendy, A. A., & Sunarsi, D. (2020). Persepsi mahasiswa terhadap kemampuan dalam mendirikan UMKM dan efektivitas promosi melalui online di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(3), 702–714.

- Effendy, A. A., Sunarsi, D., Supriyatna, W., Masriah, I., & Nurhadi, A. (2025). Enhancing MSME competitiveness in the creative industry through human resources development in South Tangerang. *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik*, 9(2), 138-151.
- Juita, H. (2026). Kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial (JIPS)*, 13(3), 823-833. <https://doi.org/10.31604/jips.v13i3.2026.823-833>
- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. (2025). Slide presentasi: Peta prioritas wilayah pengentasan kemiskinan. Kemenko PMK.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2020). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Bappenas.
- Narayan, D. (Ed.). (2005). *Measuring empowerment: Cross-disciplinary perspectives*. The World Bank.
- Pemerintah Kota Tangerang. (2025). Data Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) September 2025. Pemerintah Kota Tangerang.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sekretariat Kabinet.